

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PAKIS
NOMOR:188.45/ /KEP/421.625/2015
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Pakis adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Pakis. Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup 1) Tahap perumusan Rencana kerja SKPD; dan 2) Tahap penyajian Rencana kerja SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Pakis merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi

dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran . Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah , serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2015.

Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Malang di Kecamatan Pakis dalam rangka mencapai masyarakat Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB), yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah . Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam arti Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi Perangkat Daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan social budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Pakis digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan

Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun 2016.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakis disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 38/D);
 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Atas Implementasi dan Pencapaian Visi-Misi Kabupaten Malang "Madep Manteb" Paruh Waktu;
 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
 18. Keputusan Bupati Malang Nomor 180/703/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerjaini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pakis Tahun 2016;
2. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan Kecamatan Pakis pada Tahun 2016.

1.3.2. Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pakis Tahun 2016 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPDKabupaten Malang tahun2016;
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Rencana Kerja ni bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Pakis dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPDKabupaten Malang tahun 2016.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Pakis tahun 2016 secara garis besar disusun dengan sistematik sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJAKECAMATAN
PAKISTAHUN2014**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakis Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PAKIS**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pakis

BABIV : PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAKIS
TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakis Tahun 2015 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakis tahun 2016 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Adapun fungsi dari Kecamatan Pakis adalah :

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program kegiatan;
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan, pembinaan masyarakat dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pemerintahan;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti tersebut diatas;
4. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
5. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Sesuai tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Pakis memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Pelayanan umum

- a. Proses dan penyelesaian KTP dan Pengantar KK;
 - b. Rekomendasi dan Legalisasi surat keterangan penduduk pindah/dating;
 - c. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan IMB, Ijin Usaha, kredit dan lain-lain;
 - d. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan domisili usaha/perusahaan;
 - e. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan tidak mampu;
 - f. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan catatan kepolisian;
 - g. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan ahli waris, surat kuasa dan legalisasi surat-surat.
2. Fasilitasi pembinaan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban;
 3. Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan seni budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga;
 4. Fasilitasi pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha UKM dan kegiatan perekonomian lainnya;
 5. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta memelihara sarana prasarana fisik/infrastruktur;
 6. Membantu pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
 8. Fasilitasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Renja Kecamatan Pakis tahun 2014 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pakis. Realisasi program dan kegiatan yang ditargetkan pada Rencana kerja Tahun 2014 Kecamatan Pakis sebesar 20% sesuai dengan target per tahun dalam Renstra, dan saat ini masih tercapai 50%. Hal ini disebabkan karena proses pencairan anggaran masih berjalan sampai bulan Juni 2015, sehingga anggaran yang terserap pun masih 50%. Sedangkan capaian Renstra Kecamatan Pakis sampai dengan tahun 2015 sebesar 100% dari target 100% yang akan dicapai pada tahun 2015. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2015 dan

Capaian Renstra Kecamatan Pakis Tahun 22015 disampaikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015
KECAMATAN PAKISKABUPATEN MALANG**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2011 s.d. 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2011 s/d Tahun 2015	
					Target Renja SKPD Tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2011 s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.20.1.20.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100 %
1.20.1.20.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100 %
1.20.1.20.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100 %
1.20.1.20.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2011 s.d. 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2011 s/d Tahun 2015	
					Target Renja SKPD Tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2011 s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100 %
1.20.1.20.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	100 kali	60 kali	20 kali	20 kali	100%	20 kali	100 kali	100 %
1.20.1.20.09.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah penugasan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	320 kali	192 kali	64 kali	64 kali	100%	64 kali	320 kali	100%
1.20.1.20.09.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1.20.1.20.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas pemeliharaan gedung kantor	300 m2	180 m2	60 m2	60 m2	100 %	60 m2	300 m2	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2011 s.d. 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2011 s/d Tahun 2015	
					Target Renja SKPD Tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2011 s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	960 kali	576 kali	192 kali	192 kali	100 %	192 kali	969 kali	100 %
1.20.1.20.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1.20.1.20.09.02.22	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 orang	12 Orang	4 orang	4 orang	100%	4 orang	20 orang	100 %

Penjelasan Tabel 2.1. diatas adalah bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2014-2015 sesuai dengan target dan rencana diselaraskan dengan Asumsi yang diharapkan dalam Rencana Strategis 2010-2015. Realisasi yang diharapkan dengan yang telah dilaksanakan dapat dilihat linier, baik secara capaian hitungan bulan maupun prosentase.

Yang perlu menjadi catatan hanya pada pertengahan Tahun 2015 untuk anggaran kecamatan terdapat penambahan sebesar Rp. 250.000.000,-. Hal ini juga direncanakan hal yang sama pada Tahun 2016 sehingga mulai pertengahan Tahun 2015 ini segera ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan juga menjadi proyeksi Renja Tahun 2016.

Berdasar evaluasi Renja Kecamatan Pakis Tahun 2014 adalah semua program terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Pakis. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbaru.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Saat ini Kecamatan Pakis sudah memiliki Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur dan indicator kinerja yang akan diuji. Utamanya terkait IKU untuk kecamatan masih sama secara general.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Pakis ditargetkan setiap tahun mulai tahun 2011 sebesar 20%, dan untuk pelaksanaan kinerja sampai Juni 2015 masih 80%. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Pakis secara rinci disampaikan pada Tabel. 2.2.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PAKISKABUPATEN MALANG

No.	Indikator/Capaian kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun s.d. 2015 (Semester I)	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kelancaran Proses Administrasi kependudukan		Rata-rata lamahari <u>proses penyelesaian</u> SOP Pemrosesan	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
2	Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam		Jumlah usulan musrenbangcam yang <u>terrealisasi</u> Jumlah Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Prosentase Keaktifan Siskamling		Jumlah Kelompok <u>Siskamling Aktif</u> Jumlah RW	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	

Penjelasan Tabel 2.2 diatas adalah bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pakis terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Utamanya dapat dilihat sebagaimana perkembangan yang dinamis. Sampai dengan Semester I Tahun 2015 perkembangan kinerja masih berlangsung, kecuali bidang Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dikarenakan pelaksanaannya yang telah selesai dilaksanakan pada Bulan Pebruari 2015 dan memang hanya sekali dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya sampai dengan sekarang masih dilakukan dan dalam penilaian dan evaluasi kinerja. Proyeksi Tahun 2016 diharapkan lebih baik dari Tahun 2015 ini.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pakis sudah optimal namun tidaklah menutup kemungkinan masih terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pakis tentunya dalam melayani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat. Berikut ini adalah permasalahan sekaligus upaya tindak lanjut yang dihadapi Kecamatan Pakis antara lain :

Permasalahan :

Masa beralihnya dari KTP Konvensional ke Elektronik KTP (e-KTP) di Kecamatan Pakis yang ditargetkan 63.250 wajib e-KTP, telah melakukan perekaman sebanyak 57.264 wajib e-KTP, dan sudah tercetak sebanyak 56.807 e-KTP. Hal ini membuat masyarakat yang belum tercetak e-KTP-nya beralih kembali ke KTP Konvensional dengan alasan proses cetak e-KTP terlalu lama sedangkan kebutuhan administrasi yang tidak dapat ditunda-tunda.

Upaya tindak lanjut :

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat berdasarkan kondisi yang ada dan berupaya melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini juga dituntut untuk memperhatikan dan mendorong tumbuhnya kesetaraan *gender*, karena perempuan mempunyai peran yang cukup penting dalam

pembangunan. Untuk itu diperlukan program-program pemberdayaan perempuan yang mampu menciptakan tumbuhnya kemampuan dan kemandirian perempuan dalam kehidupan sosial ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan MDGs, pemerintah Kecamatan Pakis berupaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih menghadapi beberapa kendala.

Permasalahan Kecamatan Pakis dalam melaksanakan tupoksi adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait dengan sarpras di kantor kecamatan yang masih kurang memadai;
2. Masih lemahnya koordinasi antara sektor dan instansi terkait dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas SDM aparatur kecamatan belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
5. Terbatasnya anggaran pendukung operasional kegiatan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pakis secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan

a. Bidang Ekonomi

- Di bidang ekonomi ditemui permasalahan kurangnya dukungan pemerintah desa terhadap pengembangan lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa, sehingga masih belum dapat berkembang secara maksimal.
- Kurangnya kemampuan SDM pengelola lembaga ekonomi desa dalam melaksanakan pengelolaan dan administrasi lembaga ekonomi desa.

- Rendahnya kesadaran masyarakat / anggota dalam pelestarian kegiatan usaha ekonomi.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan lembaga-lembaga ekonomi desa serta mengikut sertakan anggota kelompok – kelompok ekonomi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas terkait.

b. Bidang Pembangunan

- Dalam hal pembangunan permasalahan yang dihadapi masih tingginya ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan dari pemerintah dan masih rendahnya swadaya masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat desa terhadap pemeliharaan sarana-prasarana, sehingga banyak hasil-hasil pembangunan yang rusak dan tidak terawat.

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain memfasilitasi perencanaan pembangunan desa sehingga dihasilkan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas dan kemendasakan kegiatan. Serta mengadakan fasilitasi untuk menggalakan swadaya masyarakat dalam menunjang program-program pembangunan dengan menggali potensi-potensi desa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung swadaya.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- Dalam bidang Pemberdayaan Perempuan masalah yang muncul adalah masih kurangnya keberanian dalam mengambil inisiatif bagi perempuan untuk membentuk kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif (UKM) sesuai dengan potensi di wilayahnya.

Untuk itu masih perlu diupayakan pembinaan bagi kelompok-kelompok perempuan yang ada untuk terus melakukan inovasi pengembangan usaha bagi peningkatan kemampuan dan ketrampilan perempuan.

2. Bidang Pemerintahan

a. Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :

- Kurang optimalnya administrasi dan pencatatan kependudukan
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP, KK dan Akta Lahir
- Lemahnya pemahaman warga terhadap prosedur administrasi kependudukan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui pemerintah desa melakukan sosialisasi prosedur pengurusan dan pentingnya memiliki KTP, KK dan Akta Lahir pada masyarakat. Melaksanakan pengurusan KTP, KK dan Akta Lahir secara massal bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

b. Pemerintahan Desa

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Dalam pembuatan Peraturan Desa di Tahun 2015 masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya petunjuk dan pelatihan bagi Pemerintahan Desa sehingga produk hukum yang dihasilkan masih terkesan seadanya, tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika maupun filosofi hukum.
- Belum optimalnya kemampuan dan pengetahuan serta kedisiplinan Perangkat Desa.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :

- Memberikan Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, mengikutkan Kepala Desa / Perangkat Desa pada pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah

- Melakukan pembinaan terhadap perangkat desa, melalui apel bersama tingkat kecamatan maupun datang langsung ke desa-desa.

c. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), permasalahan yang dihadapi :

Dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD di Kecamatan Pakis masih belum sempurna karena kurang optimalnya kemampuan SDM pemerintah desa. Apalagi dengan adanya petunjuk penyusunan pertanggungjawaban yang sering mengalami perubahan sehingga membingungkan para PTPKD. Untuk itu selalu diadakan koordinasi dengan SKPD terkait, guna mendapatkan informasi dan masukan sebagai bahan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD.

d. Pembinaan Perangkat, Permasalahan :

- Masih perlu peningkatan Sumberdaya Manusia Perangkat Desa terhadap pemahaman tupoksi dan kemampuan mengoperasikan sarana komputer dalam mendukung pelaksanaan tugas
- Sistem administrasi produk hukum, kependudukan dan urusan pemerintahan kurang tertata dengan baik.
Upaya yang telah dilakukan :
- Pembinaan perangkat desa terhadap pemahaman tupoksi dalam rangka mendukung sistem manajemen Pemerintah Desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Pembinaan administrasi desa sesuai tupoksi perangkat sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja aparatur.
- Pembuatan aplikasi kependudukan yang dapat mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

- Fasilitasi terhadap pengalokasian anggaran untuk meningkatkan kualitas sarana perkantoran guna menunjang efektif dan efisienya kinerja pemerintah desa.

3. Bidang Pertanahan dan Aset

- Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang dihadapi di wilayah tidak terlalu signifikan.
- Masih terdapat SPPT ganda.

Upaya yang telah dilakukan :

- Membentuk Petugas Khusus Kecamatan dan Petugas Rayonisasi Kecamatan untuk masing-masing desa. Untuk tingkat Desa membentuk Petugas Khusus dan Petugas Pemungut. Dengan terbentuknya Petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas Khusus Kecamatan bertugas mengkoordinir Petugas Rayonisasi dan Petugas Khusus Desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB serta membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah. Petugas Khusus Desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas Pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu Petugas Pemungut menangani Wajib Pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).
- Mengadakan publikasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya membayar PBB setelah SPPT turun dan sebelum jatuh tempo pelunasannya untuk memaksimalkan penerimaan PBB.

4. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan bagi warga.
- Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah)
- Belum optimalnya fungsi organisasi kepemudaan dalam menciptakan lapangan kerja bagi pemuda dengan kegiatan -

kegiatan yang bermanfaat dalam mengurangi pengangguran di desa.

Upaya yang telah dilakukan:

- Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB.
- Mengadakan fasilitasi bagi organisasi kepemudaan untuk mendapatkan bantuan baik dari pemerintah desa maupun instansi terkait dalam menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

5. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi :

- Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- Jumlah Poskamling yang layak masih belum sebanding dengan jumlah warga mulai daritingkat RT, RW maupun Dusun;
- Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- Minimnya kesadaran akan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha untuk kepedulian keamanan lingkungan maupun antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;

Upaya yang dilakukan :

- Mengadakan fasilitasi pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;

- Menghimbau pemerintah desa agar memfasilitasi pembuatan poskamling dan membentuk kelompok-kelompok siskamling;
- Pembentukan unit Operasional Penanggulangan Bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- Mengadakan Sosialisasi dan Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana;

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Pakis memiliki peluang dan tantangan yang dapat mendukung dan menjadi motivasi dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Pakis, yaitu :

1. Peluang

- Adanya pelimpahan kewenangan Bupati dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015.
- Mudahnya akses informasi
- Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2. Tantangan

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- Adanya daya saing antar wilayah Kecamatan dalam percepatan pembangunan terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang Madep Manteb.
- Perubahan tatanan sosial karena pengaruh regional, nasional, maupun global yang begitu cepat.
- Semakin kritisnya masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

2.4. Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja

Kecamatan Pakis berdasarkan RKPD Kabupaten Malang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Malang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pakis.

Dalam tahun 2016 RKPD Kecamatan Pakis mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan naik dibandingkan anggaran tahun 2015 yang masih sebesar Rp. 250.000.000,-

Untuk lebih jelasnya mengenai review RKPD dapat dilihat Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2016

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pakis		12 bln	226.332.00 0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pakis			226.332.00 0	
1	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik	Kantor Camat Pakis	Tersedianya sarana komunikasi, listrik dan air	100%	14.400.000	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik	Kantor Camat Pakis	Tersedianya sarana komunikasi, listrik dan air	100%	14.400.000	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Pakis	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	55.080.000	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Kantor Camat Pakis	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	55.080.0000	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Camat Pakis	Terpenuhinya kelengkapan kebersihan kantor	100%	6.556.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Camat Pakis	Terpenuhinya kelengkapan kebersihan kantor	100%	6.556.000	
4	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Camat Pakis	Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat	100%	7.800.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Camat Pakis	Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat	100%	7.800.000	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Camat Pakis	Tersedianya sarana komunikasi, listrik dan air	100%	14.400.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Camat Pakis	Tersedianya sarana alat tulis kantor	100%	11.431.000	
6	Penyediaan barang cetakan danpenggandaan	Kec. Pakis	Tersedianya sarana cetakan dan penggandaan	12 bulan	11.640.000	Penyediaan barang cetakan danpenggandaan	Kec. Pakis	Tersedianya sarana cetakan dan penggandaan	12 bulan	11.640.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan komponen instalasi listrik	Kec. Pakis	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik	100%	2.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik	Kec. Pakis	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik	100%	2.000.000	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Kec. Pakis	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	100%	2.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Kec. Pakis	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	100%	2.500.000	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Pakis	Tersedianya sarana makanan dan minuman	100%	23.600.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Pakis	Tersedianya sarana makanan dan minuman	100%	23.600.000	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Pakis	Tersedianya sarana koordinasi dalam daerah	100%	131.325.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Pakis	Tersedianya sarana koordinasi dalam daerah	100%	131.325.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kec. Pakis	Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun		192.190.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kec. Pakis			192.190.000	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Pakis	Tersedianyaperalatan gedung kantor	100%	66.200.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Pakis	Tersedianyaperalatan gedung kantor	100%	66.200.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Pakis	Tersedianya sarana pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	80.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Pakis	Tersedianya sarana pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	80.000.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Pakis	Tersedianya sarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	25.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Pakis	Tersedianya sarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	25.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								I			
4	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	Kec. Pakis	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	100%	18.010.000	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	Kec. Pakis	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	100%	18.010.000	
5	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan gedung kantor	Kec. Pakis	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan gedung kantor	100%	1.930.000	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan gedung kantor	Kec. Pakis	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan gedung kantor	100%	1.930.000	
6	Pemeliharaan Rutin / berkala Mebeler	Kec. Pakis	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Mebeler	100%	1.050.000	Pemeliharaan Rutin / berkala Mebeler	Kec. Pakis	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Mebeler	100%	1.050.000	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Pakis			4.800.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Pakis			4.800.000	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Pakis	Tersedianya kapasitas pendidikan dan pelatihan formal	12 bulan	4.800.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Pakis	Tersedianya kapasitas pendidikan dan pelatihan formal	12 bulan	4.800.000	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan	Kec. Pakis			2.024.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian	Kec. Pakis			2.024.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan					Kinerja dan Keuangan					
1	Laporan Kinerja SKPD	Kec. Pakis	Terlaksananya Laporan Kinerja SKPD	100%	1.392.000	Laporan Kinerja SKPD	Kec. Pakis	Terlaksananya Laporan Kinerja SKPD	100%	1.392.000	
2	Penyusunan laporan-laporan keuangan akhir tahun	Kec. Pakis	Terlaksananya penyusunan laporan-laporan keuangan akhir tahun	100%	6.32.000	Penyusunan laporan-laporan keuangan akhir tahun	Kec. Pakis	Terlaksananya penyusunan laporan-laporan keuangan akhir tahun	100%	6.32.000	
V	Program Administrasi kependudukan	Kec. Pakis	Kelancaran proses Administrasi kependudukan	100%	5.000.000	Program Administrasi kependudukan	Kec. Pakis	Kelancaran proses Administrasi kependudukan	100%	5.000.000	
1	Program Administrasi kependudukan	Kec. Pakis	Kelancaran proses Administrasi kependudukan	100%	5.000.000	Program Administrasi kependudukan	Kec. Pakis	Kelancaran proses Administrasi kependudukan	100%	5.000.000	
VI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Pakis	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	6.500.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Pakis	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	6.500.000	
1	Penyelenggaraan Musrenbang rencana kerja pemerintah	Kec. Pakis	Terlaksanya Penyelenggaraan Musrenbang rencana kerja	100%	6.500.000	Penyelenggaraan Musrenbang rencana kerja pemerintah	Kec. Pakis	Terlaksanya Penyelenggaraan Musrenbang rencana kerja	100%	6.500.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	daerah(RKPD)		pemerintah daerah(RKPD)			daerah(RKPD)		pemerintah daerah(RKPD)			
VII	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Pakis			11.250.000	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Pakis			11.250.000	
1	Pengendalian keamanan lingkungan	Kec. Pakis	Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan	100%	11.250.000	Pengendalian keamanan lingkungan	Kec. Pakis	Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan	100%	11.250.000	
VII I	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Pakis	Cakupan pemenuhan peningkatan disiplin aparatur negara	100%	11.904.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Pakis	Cakupan pemenuhan peningkatan disiplin aparatur negara	100%	11.904.000	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kec. Pakis	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	11.904.000	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kec. Pakis	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	11.904.000	
TOTAL					500.000.000					500.000.000	

Penjelasan Tabel 2.3 diatas adalah bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pakis terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Utamanya dapat dilihat sebagaimana perkembangan yang dinamis. Sampai dengan Semester I tahun 2015 perkembangan kinerja masih berlangsung, kecuali bidang Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dikarenakan pelaksanaannya yang telah selesai dilaksanakan pada bulan Pebruari 2015 dan memang hanya sekali dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini akan diuraikan hasil kajian atau usulan yang diberikan oleh masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan Kecamatan Tahun 2015 terhadap program/kegiatan yang ada di Kecamatan Pakis terutama dalam bidang fisik sarana dan prasarana dengan prioritas percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptakarya dan listrik pedesaan.

Berikut ini tabel 2.5 yang akan menunjukkan usulan program dan kegiatan Tahun 2016 atau kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2015

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2015

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	SKPD Penanggungjawab	Catatan
Bidang Sarana Prasarana							
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Lanjutan Jembatan	Dsn.krajan Rt.02 Rw.02 Desa pucangsongo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian		Dinas Bina Marga	-
2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jembatan	Dsn. Ngamprong Rt.01 Rw.05 Desa Banjarejo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	20 M X 2 M	Dinas Bina Marga	
3.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Gorong - Gorong	Sepanjang Jalan raya Desa Sukoanyar	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	1,2 X 2 X 0,5 x 1.500 m	Dinas Bina Marga	
4.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Drainase	Desa Mangliawan	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	2.000 M	Dinas Bina Marga	
5.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Drainase	Dsn. Pulosari Desa Tirtomoyo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	1.000 M	Dinas Pengairan	
6.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Drainase	Dsn. Dami Rt.01,02,03 Rw. 03 Desa Ampeldento	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor	218 m3	Dinas Bina Marga	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	SKPD Penanggungjawab	Catatan
				perekonomian			
7.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Penyemiran	Rt.04 Rw.06 s/d Rt.04 Rw. 07 Desa Pakisjajar	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	37,8 M	Dinas Bina Marga	
8.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jembatan	Dsn. Bonangan desa Sumberkradenan	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	1 Paket	Dinas Bina Marga	
9.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jembatan	Dsn. Genitri Rw. 02 Desa Kedungrejo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	300 M	Dinas Bina Marga	
10.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Penyemiran Jalan	Desa Bunutwetan	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	9 000 M	Dinas Bina Marga	
11.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Penyemiran Jalan	Rw. 01 Desa Asrikaton	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	810 m X 2,5 m	Dinas Bina Marga	
12.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pengaspalan Jalan Sawojajar II	Sawojajar II Desa Sekarpuro	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	3.000 M2	Dinas Bina Marga	
13.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Damping	Dsn. Gagaksinan Desa Sumberpasir	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	50 m X 600 m	Dinas Bina Marga	
14.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Aspal Jalan	Rw. 15 Desa Saptorenggo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	4 X 1.500 M	Dinas Bina Marga	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	SKPD Penanggungjawab	Catatan
15.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jembatan Jambon	Dsn. Jambon Desa Pakiskembar	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	10 m X 4 m	Dinas Bina Marga	
16.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Drainase	Rt. 01 Rw. 06 desa Pakisjajar	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	539,4 M	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	
17.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pembangunan Drainase	Rw. 01 -04 desa Pucangsongo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	7.300 M	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	
18.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Damping Jalan (TPT)	Desa Sumberkradenan	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	1 Paket	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	
19.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Renovasi Kantor Desa	Kantor Desa Mangliawan	Peningkatan Prasarana	1 buah	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	
20.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Drainase	Dsn. Kedungboto Rw. 03 Desa kedungrejo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	350 M	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	
21.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Paving	Rw. 09 (Blok H) Desa Asrikaton	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	234 M x 4 M	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	
22.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Gorong-Gorong (JI. Mawar)	Ngadipuro Lor dan Wiyagan Desa Sekarpuro	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	500 M2	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	
23.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pavingisasi	Dsn. Kanigoro Desa Tirtomoyo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	1.000 M	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	SKPD Penanggungjawab	Catatan
24.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Gorong – Gorong Jalan Raya	Dusun Krajan Desa Sumberpasir	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	1.500 X 1 X 0,5 M	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
25.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Paving Jalan	Rt. 01 Rw. 01 Desa Saptprenggo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	150 M	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
26.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Paving	Rt. 09 Rw. 03 Desa Ampeldento	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	90 m3	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	
27.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Plengsengan	Dsn. Ngedem Desa Pakiskembar	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	150 X 0,45 X 4 m	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
28.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Sarana Prasarana PKK	15 Desa		15 Unit	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
29.	Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Perbaikan Saluran Irigasi	Desa Bunutwetan	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	100 M	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
30.	Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Saluran Air (irigasi)	Sawah Desa Pakisjajar	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	415,0 M	Dinas Pengairan	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	SKPD Penanggungjawab	Catatan
31.	Program Pengembangan &PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Drainase dan di Blok Kancing dan Dam Pembagi	Desa Pucangsongo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	1.000 M	Dinas Pengairan	
32.	Program Pengembangan & PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Cek Dam Jembatan sungai Lajing	Perbatasan Dusun Krajan dan Dusun Ngamprong Desa Banjarejo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	16 M X 4 M	Dinas Pengairan	
33.	Program Pengembangan &PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pembangunan Saluran irigasi Kebon Nonggo	Dusun Krajan Desa Banjarejo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	2.000 M	Dinas Pengairan	
34.	Program Pengembangan &PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Normalisasi Saluran Pembuang (Penggalan Walet)	Jl. Raya Wendit Desa Mangliawan	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	1.500 M	Dinas Pengairan	
35.	Program Pengembangan & PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Plengsengan	Desa Kedungrejo	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	3,5 X 5 M	Dinas Pengairan	
36.	Program Pengembangan &PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Perbaikan Saluran irigasi	Desa Bunutwetan	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	100 M	Dinas Pengairan	
37.	Program Pengembangan &PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pembangunan Plengsengan dan Galian walet	Dusun Sekaran Desa Sekarpuro	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor	520 M2	Dinas Pengairan	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	SKPD Penanggungjawab	Catatan
				perekonomian			
38.	Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Drainase /irigasi	Dusun Dami Rt.02 Rw.04 desa Ampeldento	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	98 M3	Dinas Pengairan	
39.	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi sungai, Danau dan sumber daya air	Damping penahan Banjir	Dusun Botoputih Desa Sumberpasir	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendorong sektor perekonomian	70 cm x 800 M	Dinas Pengairan	
Bidang Pemerintahan, Sosial & Budaya							
40.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Desa Pucangsongo		2 Kegiatan	Dinas Cipta karya dan Tata Ruang	
41.	Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang Mandiri	Insentif Kader BKB, BKR, BKI, dan pembekalannya	15 Desa		15 Unit	Badan Keluarga Berencana	
42.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga Kerja	Pelatihan Karang Taruna dan PKK	15 Desa		15 Unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
43.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga Jaringan Irigasi	Pengadaan alat Kesenian dan Olahraga	15 Desa		15 Unit	Dinas Pemuda dan Olahraga	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	SKPD Penanggungjawab	Catatan
44.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama	Penambahan Insentif Guru Ngaji	15 Desa		15 Unit	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	
45.	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Renovasi Gedung TK Muslimat 18	Rt. 03 Rw.05 Desa Banjarejo	Meningkatkan Proses Belajar	1 Unit	Dinas Pendidikan	
46.	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehap Atap Gedung TK Muslimat 18	Dusun Ngamprong Rt.03 Rw. 05 Desa Banjarejo	Meningkatkan Proses Belajar	84 M2	Dinas Pendidikan	
47.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan kendaraan Roda 4 pelayanan Kesehatan	15 Desa		15 Unit	Dinas Kesehatan	
48.	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rehap Gedung Polindes	15 Desa	Meningkatkan Upaya kesehatan Masyarakat	1 lokasi (5 m x 7 m)	Dinas Kesehatan	
Bidang Ekonomi							
49.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Simpan Pinjam anggota pertanian	Desa Pucangsongo		50 Orang	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
50.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Pengadaan Hand Traktor	Desa Pucangsongo		4 Unit	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	SKPD Penanggungjawab	Catatan
51.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Pengadaan Mesin Perontok Padi	Desa Pucangsongo		2 Unit	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
52.	Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan	Pelatihan Penggemukan Sapi dengan cepat	Desa Pucangsongo		0	Dinas Peternakan dan kesehatan hewan	
53.	Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan	Pembangunan pemanfaatan kotoran Sapi	Desa Pucangsongo		5 Unit	Dinas Peternakan dan kesehatan hewan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Daerah

Telaah terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang, dimana secara teknokratis prioritas telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2011 – 2015 dicanangkan visi pembangunan Kabupaten Malang adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB.

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera dalam 5 tahun yang akan datang diperlukan upaya mewujudkan :

a. **Mandiri**, yang dimaknai pertama :kemandirian pengelola daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensisumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumberdaya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik.

Kedua :kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan denganmengandalkankemampuan dankekuatan sendiri.

b. **Agamis**, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

c. **Demokratis**, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berlandaskan hukum dan keadilan, sedangkan di sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Pancasila yang ditandai dengan perilaku

Kebijaksanaan dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

- d. **Produktif**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.
- e. **Maju**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
- f. **Aman**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada Hak Asasi Manusia.
- g. **Tertib**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
- h. **Berdayasaing**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro kecil, menengah dan koperasi untuk berdayasaing di pasar lokal maupun nasional.

Dalam rangka mendukung visi tersebut, Kecamatan Pakis dengan segala sumber daya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan akan mengoptimalkan peran serta masyarakat Kecamatan Pakis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya yaitu melalui visi Kecamatan Pakis **“Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Pakis yang MADEP MANTEB Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Secara Maksimal”**.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, “Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.” Dan pada Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi, “Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.”

Salah satu kebijakan bahwa setiap desa diharuskan mempunyai produk unggulan desa dan pada setiap Kecamatan mempunyai produk unggulan. Produk unggulan yang sudah mendapat pangsa pasar baik di dalam wilayah

Kabupaten Malang maupun diluar wilayah Kabupaten Malang yaitu :Keripikbuah, , kerajinan plastic dan souvenir, produksi opak gambir, getas kering, kerajinan Aplikasi dan sebagainya. Bahkan ada produk unggulan dari Kecamatan Pakis yang sudah go international adalah kerajinan bordir yang saat ini menjadi ikon Kabupaten Malang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakis adalah memfasilitasi keberhasilan tugas-tugas dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan demi untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan desa yang lebih baik dan memberikan pelayanan administrasi yang optimal kepada masyarakat. Namun, tidaklah menutup kemungkinan masih terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pakis tentunya dalam melayani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, maka diperlukan koordinasi antar seksi sehingga dapat mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kecamatan Pakis kearah yang lebih baik.Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat untuk dapat menyadari pentingnya peningkatan pembangunan di wilayah Kecamatan Pakis.

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
SKPD KECAMATAN PAGELARANKABUPATEN MALANG**

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2016 ini merupakan penjabaran kedua dari Renstra Kecamatan Pakis tahun 2011-2016

Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2016 akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2016, khususnya dalam menyusun RKA 2016.

Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan

Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2016 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan ini akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui LKPJ kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

CAMAT PAKIS

Drs. CHOLIK, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590503 198508 1 001